

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**



Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan - Karanganyar

Nomor Telepon : (0271) 495591

Website : dispermades.karanganyarkab.go.id

E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemic COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemic COVID-19. Meskipun demikian DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Karanganyar, Februari 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2. Anggaran.....	3
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Dasar Hukum.....	5
1.5. Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kinerja Tahun n	11
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.1.1. Skala Capaian Kinerja.....	19
3.1.2. Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan....	19
3.1.3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	21
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	22
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan..	23
3.1.6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	26

3.2. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	35
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023	35
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun n 37	
Lampiran 3 Matriks Renstra	39
Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah	47
Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1	57
Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023	12
Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023	13
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	19
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n.....	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	21
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	22
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	23
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

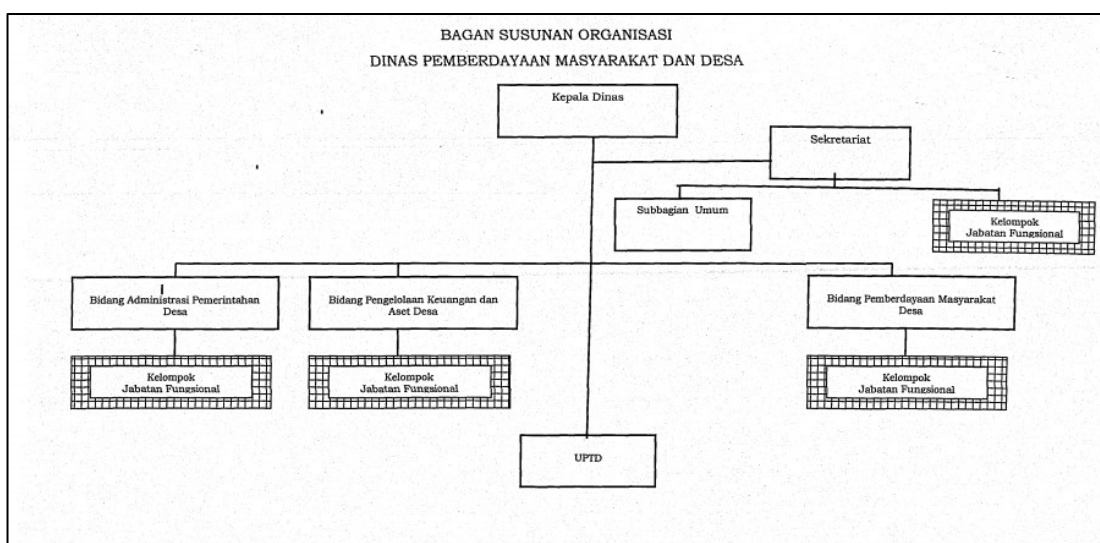
Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- pelaksanaan administrasi Dinas;
- pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Sumber : Peraturan Bupati Karanganyar No. 112 Tahun 2021

1.2.2. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 18.392.926.500
APBD	Tahun n	Rp 22.702.581.246
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

1.3. Isu Strategis

Aspek-Aspek Strategis Dispermades diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dispermades) Permasalahan dan atau arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Tahun 2018 – 2023 dan Isu utama Dispermades terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Dispermades yaitu :

1. Pembinaan dan penyusunan kebijakan, pedoman, fasilitasi di bidang aset dan kekayaan desa serta fasilitasi pengelolaan administrasi desa;
2. Pembinaan dan melaksanakan penyusunan dan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi dan teknis serta fasilitasi tentang Keuangan Desa;
3. Menyempurnakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
6. Mengukur kebijakan yang berorientasi pada upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan daya saing dan Pro Investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dispermasdes dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan pemberdayaan desa dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan Sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan / peraturan dan menyikapi perubahan;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) seiring upaya mewujudkan pemerintah yang *good govermance*.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai di bidang Informasi dan Tehnologi (IT), sehingga perlu peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Informasi dan Tehnologi.
5. Perlunya peningkatan peralatan perlengkapan kerja operasional serta keamanan, kenyamanan lingkungan.
6. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Belum siapnya beberapa desa untuk menjalankan Undang-Undang Desa, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam hal pengelolaan Desa

1.4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

Tujuan dari DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Persentase desa dengan kategori desa mandiri	3	3,7	3,7	4,3	4,3
		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6426	0,6436	0,6919	0,6929	0,7078
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,6460	0,6470	0,7899	0,7909	0,8228
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,5960	0,5970	0,6319	0,6329	0,6648
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,6850	0,6870	0,6317	0,6327	0,6358
	Meningkatnya Kualitas Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	79	80	81	82	83
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	6,67	8,5	11,4	14,2	17,54
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	12	13,5	15	16	18
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	65	66	73	76	79

Sumber : Renstra DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Periode 2018 - 2023

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.	$\frac{(IKS + IKE + IKL)}{3}$	idm.kemendesa.go.id
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	indeks	Indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat	$\frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$	idm.kemendesa.go.id
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	Indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah	$\frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$	idm.kemendesa.go.id
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	Indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana	$\frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$	idm.kemendesa.go.id
Meningkatnya Kualitas Administrtasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	prosentase	Persentase desa yang melakukan tertib administrasi	$\frac{\text{(jumlah desa kategori tertib administrasi / jumlah desa)} \times 100$	Dispermades
Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	prosentase	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	$\frac{\text{(jumlah BUMDES kategori berkembang / jumlah BUMDES tahun 2018)} \times 100$	Dispermades

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	prosentase	Keterlibatan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk pembangunan desa.	(jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan di atas 15% / jumlah desa) x 100	Dispermades
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	nilai	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Inspektorat).	Dihitung berdasarkan evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	LHE dari Inspektarot

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023

2.2. Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Persentase desa dengan kategori desa mandiri	prosentase	4,3
		Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,7078
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	indeks	0,8228
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	0,6648
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	0,6358
	Meningkatnya Kualitas Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	prosentase	83
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	prosentase	17,54
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	prosentase	18
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	nilai	79

Sumber: Rencana Kerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tahun 2023

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	4,3
	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7078
	Indeks Ketahanan Sosial	0,8228
	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6648
	Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6358
Meningkatnya Kualitas Adminsitrasii Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	83
Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	17,54
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	18
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	79

Sumber: Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 %
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Desa	100 %
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	jumlah desa yang melakukan penataan dusun	162 desa
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang dibimtek penyusunan RAB Kebutuhan pembangunan jalan dan inventarisasi data infrastruktur desa	162 desa
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %
		Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	100 %
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Petugas SID	78 orang
		Jumlah Desa yang di koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desanya	162 desa
		Jumlah desa yang di monev	162 desa
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk hukum yang tersusun	2 dokumen
		Jumlah peserta sosialisasi produk hukum	178 orang
		Jumlah perda & peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun	1 produk hukum
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta terlatih menggunakan aplikasi siskeudes	162 desa
		Jumlah desa yang menyesuaikan penyusunan APBDes	162 desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa terfasilitasi asistensi dana desa	162 desa
		Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah	162 desa
		Jumlah desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa	162 desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan desa	32 bumdes
		Jumlah kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	14 kelompok

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	11 laporan
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Bantuan hibah ke pokmas	18 pokmas
		Jumlah formasi perangkat desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan	51 formasi
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa kelurahan yang memiliki profil desa	177 desa / kelurahan
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi dan monitoring aset desa (Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan aset desa)	162 desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba (Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi)	177 desa / kelurahan
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	100 %
3.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terselenggaranya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	100 %
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdesma LKD yang terbentuk	14 bumdesma
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi	3 kawasan perdesaan
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	100 %
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jml Kader KPMD yang dibina	162 orang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jml Satgas Adat yang difasilitasi	3 kelompok
		Jumlah KPSPAM yang difasilitasi	154 KPSPAM
		Jumlah PLD yang difasilitasi	42 PLD
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang dibina	8944 kader posyandu
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UP2K PKK yang dibina	25 kelompok
		Jumlah pasar desa yang dibina	7 unit
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terbentuknya rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional	12 kelompok
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa TMMMD I	1 desa
		Desa TMMMD II	1 desa
		Desa TMMMD III	1 desa
		Des/kel yg melaksanakan GRM	177 desa / kelurahan
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK yang dibina	34 desa
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	4 laporan
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	40 orang
		Jumlah SDM yang dinilai angka kredit	6 orang
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	12 bulan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	19 unit
		Jumlah alat tulis kantor cukup setiap bulan	12 bulan
		Peralatan kantor yang baik	12 bulan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	12 bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perpu yang baik	12 bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar dalam daerah	12 bulan
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	12 bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi kantor yang baik	12 bulan
		Tersedianya alat kebersihan yang cukup	12 bulan
10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik	12 bulan
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	≥ 91
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2. Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	4,3	5,6	130,23 %	Sangat Tinggi	idm.kemendesa.go.id
	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7078	0,7162	101,19 %	Sangat Tinggi	idm.kemendesa.go.id
	Indeks Ketahanan Sosial	0,8228	0,8214	99,83 %	Sangat Tinggi	idm.kemendesa.go.id
	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6648	0,6746	101,47 %	Sangat Tinggi	idm.kemendesa.go.id
	Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6358	0,6527	102,66 %	Sangat Tinggi	idm.kemendesa.go.id

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Adminsitration Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	83	83,3	100,36 %	Sangat Tinggi	Dispermades
Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	17,54	17,54	100 %	Sangat Tinggi	Dispermades
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	18	17,15	95,28 %	Sangat Tinggi	Dispermades
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	79	69,35*	87,8 %	Tinggi	LHE dari Inspektorat

**) Realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 menggunakan penilaian SAKIP 2022 (Penilaian SAKIP 2023 belum keluar).*

3.1.3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	3,7	4,32	4,94	4,3	5,6	130,23 %
	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6919	0,6937	0,7078	0,7078	0,7162	101,19 %
	Indeks Ketahanan Sosial	0,8018	0,8056	0,8228	0,8228	0,8214	99,83 %
	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6423	0,6388	0,6648	0,6648	0,6746	101,47 %
	Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6317	0,6366	0,6358	0,6358	0,6527	102,66 %
Meningkatnya Kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	80	82,1	82,1	83	83,3	100,36 %
Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	8,5	10,53	17,54	17,54	17,54	100 %
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	13,5	15	16,66	18	17,15	95,28 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	71,29	68,85	70,32	79	69,35*	87,78 %

**) Realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 menggunakan penilaian SAKIP 2022 (Penilaian SAKIP 2023 belum keluar).*

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =3/4*100
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	5,6	4,3	130,23 %
	Indeks Desa Mandiri (IDM)	0,7162	0,7078	101,19 %
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8214	0,8228	99,83 %
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6746	0,6648	101,47 %
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,6527	0,6358	102,66 %
Meningkatnya Kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	83,3	83	100,36 %
Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	17,54	17,54	100 %
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	17,15	18	95,28 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	69,35*	79	87,78 %

*) Realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 menggunakan penilaian SAKIP 2022 (Penilaian SAKIP 2023 belum keluar).

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	4,3	5,6	130,23 %		
	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7078	0,7162	101,19 %	2 dari 3 indikator telah tercapai targetnya	Berkoordinasi dengan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar terkait perlunya koordinasi antar OPD dalam hal intervensi beberapa indikator IDM, yang tidak bisa ditangani oleh Dispermades.
	Indeks Ketahanan Sosial	0,8228	0,8214	99,83 %	Kurangnya tenaga dokter dan tenaga kesehatan, Jumlah kepesertaan BPJS masih rendah, Kurangnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Paket ABC, dan pusat keterampilan atau kursus di tiap desa	Berkoordinasi dengan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar terkait perlunya koordinasi antar OPD dalam hal intervensi beberapa indikator IDM, yang tidak bisa ditangani oleh Dispermades. Salah satunya ketersediaan nakes, bisa melibatkan Dinkes.
	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6648	0,6746	101,47 %	Meningkatnya jumlah industri mikro dan kecil,	Berkoordinasi dengan Baperlitbang Kabupaten

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					meningkatnya lembaga ekonomi rakyat (Koperasi/Bumdes), meningkatnya akses jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Karanganyar terkait perlunya koordinasi antar OPD dalam hal intervensi beberapa indikator IDM, yang tidak bisa ditangani oleh Dispermades.
	Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6358	0,6527	102,66 %	Resiko bencana berkurang, kualitas lingkungan hidup di Karanganyar terjaga kualitasnya	Berkoordinasi dengan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar terkait perlunya koordinasi antar OPD dalam hal intervensi beberapa indikator IDM, yang tidak bisa ditangani oleh Dispermades.
Meningkatnya Kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	83	83,3	100,36 %	Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan aparat desa	Melakukan pembinaan administrasi ke desa-desa sekabupaten Karanganyar.
Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	17,1	17,54	100 %	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Melakukan pembinaan ke Lembaga Perekonomian desa dan masyarakat di kabupaten Karanganyar.
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	18	17,15	95,28 %	- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi undangan Rapat Musrenbang untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk	Melakukan pembinaan ke masyarakat di kabupaten Karanganyar.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<p>pembangunan di Desa. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti gotong royong untuk pembangunan di Desa.</p> <p>- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam swadaya segi pendanaan.</p>	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	79	69,35*	87,78 %	<p>- Setiap pegawai dilibatkan dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja</p> <p>- Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke website OPD atau esr.menpan secara tepat waktu</p> <p>- Mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah tercantum dalam</p>	<p>Meningkatkan koordinasi antar bidang dengan sekretariat agar kualitas penyelenggaraan pemerintah semakin baik. Mempelajari apa yang menjadi kekurangan penilaian dan berkoordinasi dengan instansi membidangi agar kedepan kualitas pelaporan semakin baik. Menindaklanjuti rekomendasi dari LHE SAKIP tahun sebelumnya.</p>

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dokumen perencanaan kinerja - Memanfaatkan aplikasi e-sakip secara optimal sebagai alat monitoring pencapaian kinerja Bupati dan OPD dan diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya	

*) Realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 menggunakan penilaian SAKIP 2022 (Penilaian SAKIP 2023 belum keluar).

3.1.6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya Kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa	100,36	97,93	2,07
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat	100	99,79	0,21
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95,28	99,16	0,84
	Nilai SAKIP	87,78	97,83	2,98

Berdasarkan tabel diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian sasaran kinerja rata-rata melebihi 90% dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENATAAN DESA			
1	Penyelenggaraan Penataan Desa			
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	38.300.800	36.850.600	96,21%
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	165.000.000	164.193.700	99,51%
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	494.425.400	480.915.769	97,27%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	50.000.000	42.457.850	84,92%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	110.000.000	107.883.615	98,08%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.199.837.500	3.056.696.050	95,35%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.156.668.000	1.126.667.500	97,41%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	339.880.000	335.409.000	94,10%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	100.000.000	86.426.063	86,43%
	Fasilitasi Pangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.545.000.000	1.510.494.100	97,77%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	29.877.600	24.820.400	83,07%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	174.000.000	152.813.000	87,82%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17.880.400	17.799.800	99,55%
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
3.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	85.000.000	84.900.000	99,88%
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	75.000.000	74.757.600	99,68%
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	310.000.000	307.877.638	99,32%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.505.353.300	5.501.574.600	99,93%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	65.120.000	55.285.200	84,90%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	70.000.000	63.258.800	90,37%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.795.000.000	1.794.795.700	99,99%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.520.000.000	1.501.743.752	98,80%
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.057.500	51.398.500	98,73%
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.620.263.246	4.471.868.202	96,79%
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	146.016.000	145.550.200	99,68%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.635.600	155.172.254	98,44%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.456.900	17.381.500	99,57%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.880.000	97,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.116.000	193.959.778	96,92%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.515.000	6.515.000	100,00%
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.880.000	6.879.600	99,99%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.000.000	57.279.288	93,90%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.280.000	99.236.500	99,96%
10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.991.000	242.997.463	96,43%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.227.000	38.214.000	99,97%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.800.000	64.755.300	99,93%

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan Dispermades

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 22.210.283.701,- atau mencapai 97,83 % dari pagu anggaran Belanja yang direncanakan sebesar Rp. 22.702.581.246,-. Rendahnya penyerapan

anggaran belanja terutama disebabkan oleh Tunjangan untuk Fungsional yang disetarakan dianggarkan 12 bulan tapi direalisasikan hanya 2 bulan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA memiliki 4 sasaran strategis dengan 2 sasaran strategis tercapai dan 2 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA adalah sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
 - c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
 - d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades.
 - e. Kapasitas dan ketrampilan aparat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal.
 - f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan desa.
 - g. Belum optimalnya penerapan Undang-Undang tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - h. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa.

- i. Belum optimalnya pengelolaan aset desa.
- j. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kelembagaan desa dan swadaya masyarakat.
- k. Belum optimalnya fasilitasi adat istiadat di masyarakat desa.
- l. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.
- m. Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang dengan baik.
- n. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UEDSP, lumbung pangan masyarakat).
- o. Belum optimalnya fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TTG dalam masyarakat.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan jumlah usaha ekonomi masyarakat khususnya BUMDes dengan terus diadakan pembinaan yang lebih intensif yang berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi desa/Sumber Daya Alam
- 3. Memfasilitasi keberadaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, RT-RW, TP-PKK, Posyandu GMS) agar aktif berperan serta dalam pemberdayaan Masyarakat.
- 4. Meningkatkan jumlah kader pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga fasilitator, motivator, dan dinamisator pemberdayaan masyarakat.
- 5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan tata pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Karanganyar, Februari 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720620 199203 1 002

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan : Bupati Karanganyar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Karanganyar, 10 Januari 2023

Pihak pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
NIP. 19720620 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	83 %
2	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	17,1 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	18 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	79

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penataan Desa	225.000.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	150.000.000,00	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.053.400.000,00	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.286.000.000,00	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.130.913.246,00	APBD
	Jumlah	20.845.913.246,00	APBD

Karanganyar, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR


Drs. H. JULIYATMONO, M.M.


SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
NIP. 19720620 199203 1 002

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah
Tahun n**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.
Jabatan : Plt. Bupati Karanganyar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

Plt. BUPATI KARANGANYAR
WAKIL BUPATI

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Karanganyar, 6 November 2023
Pihak pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19720620 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	4,94 %
		Indeks Desa Mandiri	0,7078
		Indeks Ketahanan Sosial	0,8228
		Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6648
		Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6358
1	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	83 %
2	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	17,54 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	18 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	79

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penataan Desa	203.300.800,00	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	160.000.000,00	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.217.568.900,00	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.265.473.300,00	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.856.238.246,00	APBD
Jumlah		22.702.581.246,00	APBD

Karanganyar, 6 November 2023

Pt. BUPATI KARANGANYAR
WAKIL BUPATI

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19720620 199203 1 002

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023		
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)	
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	
		04	Eidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa												
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100	100	2.203.000	100	5.140.000	100	4.390.000	100	11.738.000	
				Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	Persen		100		100		100		100		
		04.2.01	<i>F pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Persen</i>		100	2.203.000	100	5.140.000	100	4.390.000	100	11.738.000	
		04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jml Petugas SID, Jml Desa yang di koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desanya, jml desa yang di manev	Orang, desa, desa		78,162,162	310.000	78,162,162	350.000	78,162,162	350.000	78,162,162	1.010.000	
		04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jml Produk hukum yg tersusun, Jml peserta sosialisasi produk hukum, Jml perda & perbup ttng penyelenggaraan pemerintahan desa yg disusun	Dokumen, Orang, Produk hukum		2,178,1	100.000	2,178,1	100.000	2,178,1	115.000	2,178,1	315.000	
		04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Referencanaan Pembangunan Desa	Jml peserta telah menggunakan aplikasi siskeude, Jml desa yg menyesuaikan penyusunan APBDes	Desa, Desa		162,162	305.000	162,162	105.000	162,162	110.000	162,162	520.000	
		04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jml Desa terfasilitasi asistensi dana desa, Jml desa yg menerima bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah, Jml desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa	Desa, Desa, Desa		162,162,162	903.000	162,162,162	2.857.854	162,162,162	2.900.000	162,162,162	6.700.854	

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja 18	Rp. (000) 19
							Kinerja 12	Rp. (000) 13	Kinerja 14	Rp. (000) 15	Kinerja 16	Rp. (000) 17		
		04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terseleenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan desa, Jml kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	Bumdes, Kelompok		32,15	190.000	32,15	225.000	32,15	235.000	96,15	650.000
		04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala	Jml formasi kepala desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan	Formasi		0	0	11	802.146	0	0	11	802.146
		04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jml formasi perangkat desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan	Formasi		51	160.000	51	160.000	51	160.000	153	480.000
		04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jml desa/kel yang memiliki profil desa	Desa/kel		177	25.000	177	100.000	177	110.000	177	235.000
		04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi dan monitoring aset desa, terlaksananya fasilitas penjiwaan atau permasalahan tentang mutasi dan pemanfaatan tanah kas desa	Desa, Desa		162,12	205.000	162,12	250.000	162,12	255.000	162,12	710.000
		04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jml desa/kel yang mengikuti lomba	Desa/kel		177	10.000	177	150.000	177	155.000	177	315.000
Basasan OPD 2	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat			Persentase EUMDES dalam kategori berkembang	persen	6,5	11,4	100.000	14,2	150.000	17,1	200.000	17,1	450.000
Tahun 2021-2023														
Ridang Pemberdayaan Masyarakat Desa														
		03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen	63	85	100.000	95	150.000	100	200.000	100	450.000
		03.2.01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Terseleenggaranya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	persen		100	100.000	100	150.000	100	200.000	100	450.000
		03.2.01.01	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Terlaksananya kelembagaan antar desa	Desa		10	25.000	10	50.000	10	75.000	30	150.000
		03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan kawasan perdesaan	terbentuknya kawasan desa dan jejalan aktif	lembaga		4	75.000	4	100.000	4	125.000	12	300.000

Nomer	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
Basaran OPD 3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Persentase desa yang mempunyai kearsyafan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	persen	13,5	15	7.940.000	16	8.100.000	16	8.300.000	18	24.570.000
Tahun 2021-2023														
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa														
		05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	Persen	60	100	7.940.000	100	8.100.000	100	8.300.000	100	24.340.000
		05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelalunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelalunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen		100	7.940.000	100	8.100.000	100	8.300.000	100	24.340.000
		05.2.01.02	fasilitasi Pemetaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jml Posyandu yang dibina, Jml Fakor PKK, Jml Koder KPMD yang dibina, Jml Satgas Adat yang difasilitasi	Unit, Kegiatan, Crang, Kelompok		5, 1, 80, 3	170.000	5, 1, 80, 3	200.000	5, 1, 80, 3	210.000	15, 3, 240, 9	580.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
		05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kehurahan (RT, RW, PKK, Poyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kehurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah EPSPAM yang dibina, Jml Kader poyandu yang dibina	Kelompok dan Kader Poyandu		22, 8.795	5.465.000	22, 8.795	5.600.000	22, 8.795	5.620.000	66, 8.795	16.685.000
		05.2.01.05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UP2K PKK yang dibina, Jumlah pasar desa yang dibina	Kelompok, Unit		25, 7	70.000	25, 7	110.000	25, 7	120.000	75, 21	300.000
		05.2.01.06	Facilitasi Pemerintah desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terbentuknya rintisan penyantoker dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional	Kelompok		12	20.000	12	100.000	12	110.000	12	230.000
		05.2.01.07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat	Desa TMMD I, Desa TMMD II, Desa TMMD III, Des/kel yg melaksanakan GRM	Desa/Kel		1, 1, 1, 177	1.090.000	1, 1, 1, 177	1.090.000	1, 1, 1, 177	1.240.000	3, 3, 3, 177	3.420.000
		05.2.01.09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jml TP PKK yang dibina	Desa		34	1.125.000	34	1.000.000	34	1.000.000	102	3.125.000

Nomer	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
Esasran OPD 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa			Niki SAKIP	Skor	68,85	73	4.802.746	76	4.850.773	79	4.899.281	79	14.552.801
			Tahun 2021-2023											
			Sekretariat											
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	4.802.746	100	4.850.773	100	4.899.281	100	14.552.801
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen		100	10.000	100	10.500	100	11.000	100	31.500
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jml Laporan	Laporan		4	10.000	4	10.500	4	11.000	4	31.500
		01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah			100	4.162.096	100	4.207.123	100	4.252.631	100	12.621.851
		01.2.02.01	Penyediaan Gejri dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gejri dan Tunjangan ASN	bulan		12	4.162.096	12	4.207.123	12	4.252.631	12	12.621.851
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen		100	30.000	100	32.500	100	35.000	100	97.500
		01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jml SDM yang meningkat kapasitasnya, Jml SDM yang dimlai angka kredit	Orang, Orang		10, 6	30.000	10, 6	32.500	10, 6	35.000	30, 6	97.500
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100	228.563	100	228.563	100	228.563	100	685.688
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	Bulan		12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	15.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja 18	Rp. (000) 19
							Kinerja 12	Rp. (000) 13	Kinerja 14	Rp. (000) 15	Kinerja 16	Rp. (000) 17		
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml perlengkapan kantor yg tersedia, jml alat tulis kantor cukup setiap bln, peralatan kantor yang baik	Unit, bulan, bulan		11, 12, 12	70.562,5	11, 12, 12	70.562,5	11, 12, 12	70.562,5	33, 12, 12	211.688
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	bulan		12	15.000	12	15.000	12	15.000	12	45.000
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Esasen dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perpu yang baik	bulan		12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	12.000
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum kantor, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	hln, hln		12, 12	134.000	12, 12	134.000	12, 12	134.000	12, 12	402.000
		01.2.08	Penyediaan Jasa Perawang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100	149.740	100	149.740	100	149.740	100	449.220
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml surat menyurat yang tersedia	surat		2.000	4.500	2.000	4.500	2.000	4.500	6.000	13.500
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	hln		12	45.000	12	45.000	12	45.000	12	135.000
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebersihan dan keamanan kantor, tersedianya administrasi kantor yang baik, tersedianya alat kebersihan yang cukup	hln, tm, hln		12, 12, 12	100.240	12, 12, 12	100.240	12, 12, 12	100.240	12, 12, 12	300.720
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perwang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100	222.348	100	222.348	100	222.348	100	667.043

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	bln		12	170.000	12	170.000	12	170.000	12	510.000
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	bln		12	15.000	12	15.000	12	15.000	12	45.000
		01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik, Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	bln		12, 12	37.347,5	12, 12	37.347,5	12, 12	37.347,5	12, 12	112.043

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022**

Nomor : 700/41/PWS/2023
Tanggal : 21 Juli 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
Website: Inspektorat.karanganyarkab.go.id, email inspektorat_kra@yahoo.co.id

Karanganyar, 21 Juli 2023

Nomor	: 700/41/PWS/2023	Kepada:	Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: 1 (satu) bendel		
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022	di-	KARANGANYAR

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
 - d. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/231/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang tentang Program Kerja Pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Tahun 2023
 - e. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 094/115/PWS/2023 tanggal 13 Juli 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 s.d 21 Juli 2023.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
5. Metodologi Evaluasi
- a. Wawancara
 - b. Penelahaan dokumen
 - c. Analisis
6. Gambaran Umum Unit Kerja
- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dalam Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;

- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Penanggungjawab Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos.	Kepala Dinas	197206201992031002
2	Mth. Titik Setiati, S.H., M.H.	Sekretaris	196501101990032003
3	Yosep Anung Darmawan, S.E.	Kepala Bidang Adminstrasi Pemerintahan Desa	19720528200501005
4	Gunawan, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	196712231994011002
5	Bambang Siswanto N., S.I.P., M.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	197006181998031002
6	Agus Cahyono, S.Sos., M.Si	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	197108112006041011

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar No. 64 Tahun 2019.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) di tetapkan Tanggal 20 Mei 2022.
- c. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ditetapkan pada 01 September 2021.
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ditetapkan pada 14 Januari 2022.
- e. Rencana Aksi Tahun 2022 ditetapkan pada 31 Desember 2023
- f. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
- g. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 1 November 2022.
- h. Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 261 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022.

i. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	persentase	82
2	Meningkatnya kualitas Lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	persentase	14,2
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	persentase	16
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	nilai	76

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

- a. Melakukan reviu atas Renstra untuk memastikan bahwa Renstra telah disusun sesuai ketentuan.
- b. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui Upaya pertanggungjawaban kinerja tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun berikutnya memastikan bahwa anggaran mengacu pada kegiatan tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dengan Upaya pencapaian tujuan dan sasaran.
- c. Memastikan bahwa perjanjian kinerja menjadi instrument manajemen untuk monitoring dan evaluasi penilaian kinerja OPD dan individu dan sebagai dasar pemberian reward&punishment.

- d. Menyusun Indikator Kinerja Sasaran dan Tujuan juga Indikator Kinerja Utama(IKU) dengan memperhatikan kriteria indicator yang baik dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- e. Mendorong Pemanfaatan hasil evaluasi implemntasi SAKIP untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja OPD secara berkelanjutan.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil akhir evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d. 100, Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **69,35** dengan predikat "**B**".
2. Nilai tersebut merupakan penjumlahan komponen - komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja (nilai 21,60 dari bobot 30,00)
Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum perencanaan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu
 - 1) Dokumen perencanaan yang telah diformalkan belum sepenuhnya di unggah tepat waktu di *website* resmi esr.menpan atau *website* OPD dan e.monev.
 - 2) Terdapat kinerja yang ditetapkan tidak tercapai yaitu pencapaian nilai SAKIP dari target 76 hanya tercapai 70,32 atau sebesar 92,5%
 - b. Pengukuran Kinerja (nilai 21,00 dari bobot 30,00)
Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:
Telah memiliki aplikasi manajemen kinerja yakni esakip.karanganyar.go.id, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tools untuk memonitoring kinerja seluruh OPD.
 - c. Pelaporan Kinerja (nilai 11,25 dari bobot 15,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaporan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai 15,50 dari bobot 25,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

1. telah memiliki aplikasi manajemen kinerja yakni e.sakip.karanganyar.go.id, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tools untuk memonitoring kinerja seluruh OPD.
2. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
3. Sebagian besar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan namun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Realisasi	%
1.	Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	Persentase	82	82,1	101,2
2	Meningkatnya kualitas Lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	Persentase	14,2	17,54	123,5

3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	Persentase	16	16,66	104,1
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	nilai	76	70,32	92,5

Dari tabel diatas terdapat target kinerja yang tidak tercapai yaitu nilai SAKIP dari target 76 hanya terealisasi 70,32 sehingga prosentase capaiannya hanya 92,5%, sesuai analisis yang dicantumkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

3. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi diatas, kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar disarankan agar:

- a. Setiap pegawai dilibatkan dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- b. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke *website* OPD atau esr.menpan secara tepat waktu.
- c. Mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja.
- d. Memanfaatkan aplikasi e-sakip secara optimal sebagai alat monitoring pencapaian kinerja Bupati dan OPD dan diintegrasikan dengan system manajemen kinerja lainnya

C. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1

MATRIKS TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2022

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1.	Setiap pegawai dilibatkan dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Melaksanakan rapat koordinasi untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	Dispermades	Telah melaksanakan rapat koordinasi untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja
2.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke <i>website</i> OPD atau <i>esr.menpan</i> secara tepat waktu	Mempublikasikan dokumen anggaran dan laporan ke <i>website</i> OPD dan <i>esr.menpan</i>	Dispermades	Telah mempublikasikan dokumen anggaran dan laporan ke <i>website</i> OPD dan <i>esr.menpan</i>
3.	Mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja	Melakukan rapat, membahas dan mengevaluasi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mencapai target kinerja.	Dispermades	Telah melakukan rapat, membahas dan mengevaluasi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mencapai target kinerja
4.	Memfaatkan aplikasi e-sakip secara optimal sebagai alat monitoring pencapaian kinerja Bupati dan OPD dan diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya	Melakukan input target dan realisasi kinerja beserta anggaran dan realisasi belanja di aplikasi e-sakip secara berkala.	Dispermades	Telah melakukan input target dan realisasi kinerja beserta anggaran dan belanja tahun 2023 (Untuk tahun 2023 diinput realisasi setiap triwulan)


 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA
 SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P.
 Kepala Muda (IV/c)
 NIP. 19720620 199203 1 002

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n

1. Tanggal 16 Maret 2023 Menerima piagam penghargaan atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa Tahun 2022.



2. Peran Dispermades terkait area intervensi no. 8 (Tata Kelola Dana Desa)

Progress dan rencana aksi Capaian MCP Korsupgah
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 04-Des-23

8	Tata Kelola Dana Desa	6	17 a. Regulasi	Regulasi Tata Kelola Desa	100	100,0%	100,0%		
			17 b. Sistem Keuangan Desa	Siskeudes Online	100	100,0%			
			16 c. Laporan Konsolidasi APB Desa	Laporan Konsolidasi APB Desa	100	100,0%			
			17 d. Publikasi dan Transparansi	Publikasi dan Transparansi di Masyarakat	100	100,0%			
			16 e. Database Aset Desa	Database Aset Desa	100	100,0%			
			17 f. Pengawasan	Audit Keuangan Desa dan Pembinaan Desa	100	100,0%			